

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tolak ukur utama keberhasilan pembangunan dan menjadi agenda prioritas dalam kebijakan nasional. Pemerintah terus mendorong percepatan laju ekonomi karena dianggap sebagai motor penggerak utama kesejahteraan masyarakat (Suhardi & Panjaitan, 2025). Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makroekonomi yang sangat penting, karena mencerminkan secara menyeluruh tingkat keberhasilan suatu wilayah dalam melaksanakan agenda pembangunan. Peningkatan berkelanjutan dalam aktivitas ekonomi tidak hanya menjadi fondasi bagi tercapainya kemajuan material, tetapi juga menjadi penentu utama dalam upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat (Marsus et al., 2018).

Di tingkat regional, pencapaian pembangunan dievaluasi menggunakan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB menggambarkan total nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh aktivitas produksi barang dan jasa dalam batas wilayah administratif tertentu selama satu periode waktu, biasanya satu tahun. Data PDRB tidak hanya penting sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi suatu daerah, tetapi juga menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berbasis potensi lokal. Jika dihitung berdasarkan harga konstan, PDRB dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi riil tanpa dipengaruhi oleh fluktuasi harga. Sedangkan jika dihitung berdasarkan harga berlaku, PDRB bisa digunakan untuk mengetahui struktur ekonomi dan kontribusi masing-masing sektor. Sementara itu, PDRB per kapita seringkali digunakan sebagai ukuran rata-rata tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah (Dama et al., 2016).

Dalam konteks penelitian ini, fokus utama diarahkan pada identifikasi dan analisis faktor-faktor yang diyakini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional. Variabel-variabel tersebut meliputi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), serta belanja pemerintah yang dilihat dari realisasi belanja daerah. Investasi (PMA dan PMDN) sebagai penambah stok modal

dan pendorong kapasitas produksi, dianggap fundamental bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kehadiran PMA seringkali membawa transfer teknologi dan akses pasar global, sementara PMDN memperkuat fondasi ekonomi domestik dan menciptakan lapangan kerja (Manullang et al., 2024). Belanja pemerintah, melalui alokasi dana untuk infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik, memiliki potensi besar untuk merangsang aktivitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan (Eliza, 2015).

Dalam teori pertumbuhan Harrod-Domar, investasi sebagai elemen fundamental yang menentukan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, karena melalui penambahan stok modal, investasi mampu memperluas kapasitas produksi suatu negara secara signifikan. Teori ini menekankan pentingnya akumulasi modal sebagai syarat utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Ketika investasi meningkat, maka akan terjadi penambahan pada alat produksi seperti mesin, infrastruktur, dan fasilitas industri, yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan output nasional. Selain itu, investasi juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat permintaan agregat. Dengan demikian, peningkatan investasi menjadi langkah strategis dalam menciptakan perekonomian yang lebih produktif, efisien, dan tahan terhadap tekanan eksternal, seperti fluktuasi pasar global maupun gejolak ekonomi domestik (Koyongian et al., 2019).

Secara mempengaruhi, Penanaman Modal Asing (PMA) dapat menciptakan efek limpahan (*spillover*) positif yang dapat mengakselerasi kemajuan ekonomi di negara penerima (Ulfa & Febriani, 2023). Efek ini dapat tercermin dari transfer teknologi, peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal melalui proses alih pengetahuan, serta penerapan standar produksi dan manajemen yang lebih efisien. Selain itu, kehadiran PMA juga dapat memperluas kapasitas produksi nasional dan meningkatkan daya saing industri domestik di pasar internasional. Oleh karena itu, PMA dipandang sebagai salah satu instrumen penting dalam mendorong integrasi ekonomi suatu negara ke dalam perekonomian global. Sementara itu, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) juga memiliki peranan yang tidak kalah penting dalam struktur perekonomian nasional. PMDN berperan krusial dalam memobilisasi sumber daya domestik, seperti modal, tenaga kerja, dan bahan baku lokal, untuk diolah menjadi

kekuatan produktif yang berkelanjutan (Novalia et al., 2025). Melalui peran tersebut, PMDN mampu memperkuat fondasi ekonomi dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis. Dengan demikian, PMDN menjadi pilar utama dalam membangun kemandirian dan ketahanan ekonomi nasional, khususnya dalam menghadapi tekanan eksternal dan dinamika pasar global.

Selain PMA dan PMDN, peran belanja pemerintah juga sangat penting dalam mendukung laju pertumbuhan ekonomi, terutama ketika diarahkan pada pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, dan layanan kesehatan. Dalam teori ekonomi makro, belanja pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk mendorong permintaan agregat, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan sisi penawaran melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas nasional. Dengan perencanaan yang tepat sasaran dan arah investasi yang sesuai, belanja pemerintah dapat membuka lapangan kerja baru, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, apabila distribusi anggaran dan hasil pembangunan belum berlangsung secara adil dan merata di seluruh wilayah, maka potensi ketimpangan pendapatan antar daerah akan tetap tinggi. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan fiskal perlu ditopang dengan strategi pemerataan pembangunan yang berkelanjutan agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara inklusif oleh seluruh lapisan masyarakat dan wilayah (Safitri & Suseno, 2025).

Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyajikan konteks yang strategis dan relevan untuk mengkaji dinamika pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pengaruh PMA, PMDN, dan belanja pemerintah. Letaknya yang berbatasan langsung dengan negara-negara ekonomi maju seperti Singapura dan Malaysia menjadikan Kepri sebagai salah satu pintu gerbang ekonomi nasional sekaligus destinasi utama penanaman modal dalam negeri dan luar negeri, terutama di sektor industri pengolahan yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah (Bappenas, 2023). Pertumbuhan ekonomi Kepri pada tahun 2023 tercatat sebesar 5,20%, mencerminkan capaian yang sejalan dengan target pembangunan regional (Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, 2024). Kinerja investasi juga menunjukkan tren positif, dengan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang tinggi pada

sektor-sektor produktif seperti industri, perdagangan, dan jasa (Bappenas, 2023). Tingginya tingkat kepercayaan investor ini turut mengindikasikan persepsi yang baik terhadap stabilitas dan prospek ekonomi Kepri ke depan.

Di tengah capaian tersebut, fenomena menunjukkan bahwa akselerasi investasi, baik asing (PMA) maupun domestik (PMDN), tidak selamanya berbanding lurus dengan penguatan kapasitas produksi lokal, terutama jika struktur industri masih bergantung tinggi pada input eksternal yang membatasi efek ganda (*multiplier effect*) bagi perekonomian domestik. Serupa dengan itu, efektivitas belanja pemerintah menjadi penting, karena alokasi anggaran yang tinggi belum tentu menjamin terciptanya pertumbuhan yang berkelanjutan apabila tidak diarahkan secara strategis pada sektor-sektor produktif jangka panjang. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi ketimpangan struktural, di mana terjadi peningkatan output ekonomi (PDRB) tanpa diiringi transformasi ekonomi yang berkualitas dan merata. Oleh karena itu, menjadi esensial untuk mengkaji secara mendalam sejauh mana PMA, PMDN, dan belanja pemerintah secara faktual berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi regional, tidak hanya sebagai angka, tetapi sebagai cerminan keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya.

Meskipun hubungan antara PMA, PMDN, dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi telah banyak dikaji, penelitian yang secara spesifik berfokus pada konteks Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan data terkini masih menunjukkan keterbatasan. Sebuah studi kunci yang dilakukan oleh Malau, (2016) dengan menggunakan data rentang waktu 1990-2013 menemukan bahwa variabel investasi, baik PMA maupun PMDN, secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Provinsi Kepulauan Riau. Temuan ini menjadi sebuah anomali jika dibandingkan dengan berbagai studi skala nasional yang lebih baru, seperti penelitian oleh Zulhija & Benardin (2025), yang menemukan bahwa PMA dan PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa temuan mengenai tidak signifikannya pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau dalam studi-studi terdahulu perlu ditinjau ulang. Hingga saat ini, masih belum banyak penelitian yang

secara empiris menganalisis kembali pengaruh PMA, PMDN dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Kepri dengan menggunakan data terbaru. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi ulang terhadap faktor-faktor determinan pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut berdasarkan kondisi ekonomi terkini.

Merujuk pada kesenjangan penelitian yang telah diidentifikasi sebelumnya, studi ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis secara empiris bagaimana pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Kepulauan Riau. Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu 2014 hingga 2023. Temuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bermakna, baik dalam pengembangan teori ekonomi regional maupun sebagai bahan pertimbangan praktis bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran sebelumnya, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Provinsi Kepulauan Riau?
2. Apakah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Provinsi Kepulauan Riau?
3. Apakah belanja pemerintah daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Provinsi Kepulauan Riau?
4. Apakah Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan belanja pemerintah berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) di Provinsi Kepulauan Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh faktor-faktor ekonomi makro terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau selama periode 2014–2023. Secara lebih spesifik, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melihat pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di Provinsi Kepulauan Riau.
2. Melihat pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di Provinsi Kepulauan Riau.
3. Melihat pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di Provinsi Kepulauan Riau.
4. Melihat pengaruh secara simultan antara PMA, PMDN, dan belanja pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di Provinsi Kepulauan Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti baik dalam ranah pengembangan ilmu pengetahuan (teoritis), maupun dalam implementasi kebijakan dan praktik pembangunan daerah (praktis). Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori ekonomi pembangunan daerah, khususnya dalam memahami pengaruh PMA, PMDN, dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil studi ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai determinan pertumbuhan ekonomi regional dan menjadi pijakan bagi penelitian selanjutnya di bidang ini.

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan investasi dan pengelolaan belanja daerah yang lebih efektif. Bagi pelaku usaha dan investor, temuan ini memberikan gambaran empiris mengenai kondisi ekonomi daerah yang dapat mendukung pengambilan keputusan bisnis. Temuan ini juga berguna bagi praktisi pemasaran publik dalam merancang strategi promosi wilayah yang berbasis potensi ekonomi dan sumber daya manusia.